

# STRATEGI PENGUATAN MASYARAKAT SIAGA BENCANA DI KABUPATEN KAYONG UTARA

Oleh:  
**M. SAHID**  
NIM. E01111073

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Tanjungpura Pontianak Tahun 2017

Email: [conansahid@gmail.com](mailto:conansahid@gmail.com)

## Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah belum berfungsinya kelompok Masyarakat Peduli Bencana sebagai garda depan upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Kayong Utara, sehingga perlunya strategi penguatan terhadap kelompok, penelitian menggunakan teori penguatan kelembagaan, yang diukur dari beberapa indikator kelembagaan yaitu, kejelasan tujuan, kejelasan misi, fungsionalisasi, pembagian tugas, departementalisasi, keseimbangan wewenang dan tanggung jawab, kesatuan arah dan komando, kejelasan kebijakan serta rentang kendali, yang dirumuskan strategi menggunakan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum mampunya kelompok menghadapi bencana Karena volume bencana, kurangnya sumberdaya, sumberdana, sarana, serta sistem pengawasan, perencanaan yang masih kurang, dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KLU. Saran dari hasil adalah mengembangkan kemampuan dan kapasitas kelompok dalam upaya penanggulangan bencana dalam arti melibatkan seluruh elemen-elemen kelompok masyarakat dari para tokoh adat, tokoh masyarakat pada satuan terkecil unit pemukiman penduduk (RT dan RW), kelompok keagamaan (Gereja, Masjid dan Surau), pemuda dan pegawai pemerintah (TNI, POLRI dan PNS) untuk secara bersama-sama dan tergabung dalam satu peguyubantanggguh bencana sehingga besar atau kecilnya volume bencana dapat ditanggulangi serta menumbuhkan pemahaman terhadap masyarakat, akan pentingnya kerjasama serta dukungan dari seluruh elemen untuk bersama sama berupaya menaggulagi bencana, menjaga lingkungna serta mengawasi pihak pihak yang dapat merugikan lingkungan.

Kata-kata Kunci : Kelompok, Bencana, Penguatan

## Abstract

The problem of this research is the non-functioning Concerned Citizens Disaster Group as the vanguard of disaster relief efforts in the district of North Kayong, so this is need strategies to strengthen group, the study uses the theory of institutional strengthening, as measured by several indicators of institutional, namely explication of purpose, explication of mission, functionalization , division of tasks, departmentalization, a balance of authority and responsibility, unity of direction and command, clarity and range control policy, which is formulated strategies using SWOT analysis. The results showed that the group has not inability disaster because of the volume of disaster, lack of resources, funding sources facilities, as well as surveillance systems, planning is still lacking from Regional Disaster Management Agency (BPBD) TPI. Suggestions of the results is to develop the ability and capacity of groups in disaster relief efforts in the sense of involving all elements of the community of the traditional leaders, community leaders in the smallest unit of unit settlements (RT and RW), religious groups (church, mosque and surau) , youth and government officials (TNI, Police and civil servants) together and joined in a community resilient disaster so large or small volumes of disasters can be overcome and to cultivate an understanding of the community, the importance of cooperation and support from all elements to jointly strive cope with disasters, protecting the environment as well as overseeing the parties that can harm the environment.

*Keywords: Group, Disaster, Strengthening*

## A. PENDAHULUAN

Kalimantan Barat (KALBAR) merupakan provinsi yang memiliki banyak sungai dan didominasi oleh tanah gambut, kebiasaan buruk masyarakat terhadap lingkungan serta kondisi hutan yang terus berkurang setiap tahunnya berdasarkan harian Pontianak Post 1 maret 2016 penurunan luas hutan KALBAR yaitu 42,4 ribu hektar, ditambah lagi dengan degradai 94,5 hektar pertahunya.

Menanggapi permasalahan yang terjadi Gubernur KALBAR Drs. Cornelis MH, melalui Kepala Pelaksana BPBD menetapkan sosialisasi tanggap darurat bencana ke seluruh KALBAR, sebagaimana yang dimuat dalam Harian Pontianak Post pada 30 Desember 2014. Pernyataan gubernur menunjukan bahwa bencana alam yang terjadi merupakan masalah yang sangat serius dan perlu adanya kewaspadaan dan penanggulangan dari masyarakat dan pemerintah daerah.

Menurut BPBD KALBAR dalam indeks resiko bencana, KKU memiliki tingkat rawan bencana sedang dan berpotensi menjadi tingkat rawan tinggi. Potensi bencana alam di KKU menurut BPBD adalah banjir dan longsor ketika musim penghujan serta kebakaran lahan dan

kekeringan ketika musim kemarau. Besarnya potensi banjir dan kebakaran yang terjadi secara formal merupakan tanggung jawab pemerintah daerah meski telah diketahui bahwa penanggulangan bencana daerah bersinergi dengan penanggulangan bencana nasional, namun pemerintah daerah juga harus tanggap terhadap bencana yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa penanggulangan bencana bukan mutlak tanggung jawab pemerintah saja, akan tetapi seluruh elemen masyarakat terkait yang diharapkan mampu dan memahami akan pentingnya pengetahuan tentang bencana itu sendiri. Keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan bencana perlu dilakukan sejak dini, mengingat bencana yang terjadi selalu berdampak bagi seluruh sendi kehidupan di masyarakat Kecamatan Teluk Batang sebenarnya memiliki kelompok Revitalisasi Masyarakat Peduli Bencana (MPB) yang terbentuk dari BPBD KKU melalui Keputusan Bupati KKU No 188.45/266/KUM/2012 yang terdiri dari 10 orang Orientasi pembentukan kelompok MPB berdasarkan wilayah rawan bencana. Upaya kearah memperkuat kelompok ini harus perlu dilakukan secara berkelanjutan sesuai dengan prinsip penanggulangan bencana itu sendiri yaitu upaya pemberdayaan kelompok dengan pemberian

pelatihan tanggap darurat bencana sehingga kelompok mampu menjadi kelompok yang berdayaguna dan berhasilguna.

Karena sering mengalaminya, sebenarnya masyarakat telah memiliki kearifan lokal dalam peringatan dini bencana misalnya dalam menghindari bahaya longsor, mereka tidak membangun rumah di bantaran sungai atau di kaki bukit terjal, sementara untuk menghindari kebakaran, mereka menerapkan sistem pengendalian api. Namun, semua itu masih membutuhkan kepedulian dan pembinaan secara terus-menerus, terutama kepada masyarakat yang memiliki kerentanan tinggi.

Tugas dan tanggung jawab MPB adalah menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat serta sosialisasi konsep kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat dan penyadaran masyarakat tentang tingkat bahaya, kerentanan, risiko, dan volume bencana, namun besarnya resiko bencana dan volume bencana dengan minimnya anggota, kelompok ini tidak mampu menanggulangi permasalahan yang ada.

Beberapa bentuk pendekatan perlu dilakukan untuk menggali informasi terkait kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam masyarakat siaga bencana.

Pendekatan ini dilakukan untuk menentukan strategi yang direkomendasikan, dengan upaya memperkuat kelembagaan kelompok tersebut, sehingga kelompok ini dapat berfungsi sebagaimana mestinya sehingga bencana dapat diminimalisir.

Sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alenia ke-4, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan dan penghidupan termasuk perlindungan atas bencana, dan UU No 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yaitu perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi diatas peneliti mencoba mencari solusi melalui tulisan ini dengan membuat strategi penguatan terhadap kelompok MPB, penguatan kelompok ini di maksudkan untuk menanggulangi dan mengurangi risiko bencana secara sistematis dengan pemahaman dan komitmen bersama dari semua pihak terkait terutama masyarakat serta melaksanakan Rencana Aksi Pengurangan Risiko Bencana Nasional

untuk mendukung dan menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan berkelanjutan.

## B. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Pengembangan Kelembagaan (*Institution Building*)

Menurut Siagian (2009 : 169) terdapat 10 aspek prinsip-prinsip organisasi dan penerapannya adalah sebagai berikut :

- a. Kejelasan tujuan – kejelasan tujuan merupakan pedoman yang memberikan arah kepada semua kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati.
- b. Kejelasan misi – misi merupakan langkah utama yang harus diemban dalam rangka pencapaian tujuan, kejelasan misi akan mempermudah manajemen dalam menentukan strategi yang akan di tempuh, menyusun rencana, dan menentukan program kerja
- c. Fungsionalisasi – besarnya tanggung jawab organisasi menuntut pembagian tugas dalam satuan kerja tidak dapat dielakan, pembagian kerja tersebut didasarkan fungsionalitas, dan menjamin setiap fungsionalitas dapat dijalankan dengan baik.
- d. Pembagian tugas – karena banyaknya fungsi yang harus diselenggarakan, salah satu konsekuensi dari penerapan fungsionalitas ialah kejelasan dalam pembagian tugas prinsip ini penting karena tidak sedikit tugas yang spesialisitik sehingga memerlukan deskripsi dan spesifikasi tugas se jelas mungkin.
- e. Departementalisasi – salah satu cara yang dapat digunakan dalam pembagian tugas ialah departementalisasi, maksudnya semua tugas yang harus dilaksanakan dikelompokkan kedalam departemen.
- f. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab – seseorang cenderung memperbesar wewenang dan memperkecil tanggung jawab, sehingga kecenderungan tersebut perlu dipahami guna mengurangi kecenderungan tersebut.
- g. Kesatuan arah – penerapan prinsip ini lebih menekankan pada efisiensi, efektifitas kerja, dalam berarti tidak adanya upaya yang mubazir dan langkah-langkah operasional yang diambil bukan untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan umum.
- h. Kesatuan komando – prinsip ini biasa dikaitkan dengan sumber perintah

artinya pelaksanaan tugas didasarkan pada atasan, dan kepada atasan itu pula yang bersangkutan mempertanggung jawabkan tugas yang diberikan kepadanya.

- i. Kejelasan kebijakan tentang pola pengambilan keputusan – pola pengambilan keputusan didasarkan pada pola desentralisasi atau sentralisasi. Rentang kendali – dengan motivasi yang kuat, loyalitas yang dapat diandalkan, disiplin kerja yang tinggi, namun semua itu masih perlunya pengawasan agar tugas dan fungsi dapat berjalan dengan baik.

## 2.2 Manajemen Strategi

Menurut Bryson (dalam Tangkilisan 2004:11) strategi adalah upaya pengembangan keunggulan organisasi atau institusi dalam lingkungan *eksternal* yang kompetitif untuk mencapai tujuan dan sasaran. Strategi di butuhkan karena adanya perkembangan atau perubahan yang terjadi di lingkungan strategi menyinggung masalah bagaimana penggunaan atau pengelolaan sumberdaya yang dimiliki.

## 2.3 Analisis SWOT

Menurut David (2009:123) SWOT (*Strenghts, Weaknesses, Opportunities,*

*Threats*) adalah alat untuk pencocokkan dalam mengembangkan empat tipe strategi adalah sebagai berikut :

Gambar 1

Matrik SWOT

Efas /	Ifas	Kekeuatan ( <i>Strenghts</i> )	Kelemahan ( <i>Weaknesses</i> )
Peluang ( <i>Opportunities</i> )		Strategi SO	Strategi WO
Ancaman ( <i>Threats</i> )		Strategi ST	Strategi WT

Sumber : David Fred R, 2009

Mencocokkan faktor *eksternal* dan *internal* adalah bagian yang penting dalam mengembangkan matriks SWOT, dengan analisis SWOT dapat di ketahui faktor-faktor yang dapat di kembangan dimasa yang akan datang untuk pengembangan dan pemilihan strategi yang tepat.

## C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi dengan hasil data dilapangan yang kemudian dipaparkan dalam bentuk tulisan maupun tabel dan disajikan. Waktu yang digunakan untuk penyusunan laporan dan konsultasi dilakukan dari bulan Desember

2016 hingga Desember 2017. Subjek penelitian diantaranya Anggota kelompok Masyarakat Peduli Bencana berjumlah 3 (tiga) orang yaitu Sari'in, Rahman dan Subarta, Subag pencegahan dan kesiapsiagaan Ramli AM.Ra. Subag kedaruratan dan logistic Hadi wibowo yang ditentukan berdasarkan *purposive sampling*

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam teknik analisis data, penulis menggunakan olahan data secara kualitatif. analisis data menggunakan Miles dan Huberman (dalam Moleong 2011:189) mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

## D. PEMBAHASAN

### 4.1 Penguatan Kelembagaan

#### 1. Kejelasan Tujuan dan Misi

Kejelasan misi merupakan pedoman yang memberikan arah kepada semua kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati, misi merupakan langkah utama yang harus diemban dalam rangka pencapaian tujuan, kejelasan tujuan dan misi akan mempermudah kelompok dalam menentukan strategi yang akan di tempuh, menyusun rencana, dan menentukan program kerja bagi kelompok, menurut Bapak Ramli AM. Ra: *"Tujuan kelompok masyarakat peduli bencana sudah cukup jelas, disini tujuan dibentuknya agar mampu menanggulangi bencana yang terjadi dimasyarakat sekitar"*

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sari'in sebagai Ketua Kelompok Masyarakat Peduli Bencana: *"Kelompok masyarakat peduli bencana memiliki misi organisasi yang cukup jelas, dan adanya kejelasan tujuan yang ingin di capai yaitu mengurangi dampak bencana dengan siap sedia namun kami menyadari masih belum maksimal dalam penanganannya"*

Dalam kesempatan lain peneliti juga mewawancarai bapak Rahman sebagai

anggota Kelompok Masyarakat Peduli Bencana: *“Kelompok ini sudah memiliki tujuan dan misi yang jelas yaitu menanggulangi bencana”*

Berdasarkan beberapa pernyataan diatas dapat menunjukkan bahwa kelompok Masyarakat Peduli Bencana, sudah memiliki tujuan dan misi yang jelas dalam pembentukannya, dari observasi peneliti sendiri melihat memang sudah adanya visi dan misi yang cukup jelas ini yang telah tertulis dalam pembentukan kelompok itu sendiri. adapun visi tersebut adalah terwujudnya Penanggulangan Bencana Secara Cepat, Tepat, Efektif dan Efisien. Sejauh ini upaya penanggulangan bencana yang dilakukan kelompok ini belum dapat ditanggulangi dengan cepat, tepat, efektif dan efisien, seperti yang diharapkan dalam visi diatas. Tujuan dan misi yang jelas bagi kelompok MPB diharapkan dapat memberikan dasar bagi kelompok dalam pencapaian tujuan., dengan kejelasan tujuan ini kelompok mampu memastikan tujuan dasar, memberikan standar, dalam mengidentifikasi tujuan dan arah organisasi serta mampu menetapkan sasaran secara nyata., serta dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan agar tercapainya upaya

penanggulangan bencana secara cepat, tepat, efektif dan efisien. Visi yang jelas dapat memberi pengaruh yang sangat besar bagi kelompok dalam arti kelompok didorong untuk melihat jauh ke depan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek dari perubahan tersebut, menyusun rencana untuk menghadapinya bencana kedenpanya, meminimalisir pemborosan, menetap kan sasaran dan standar yang digunakan dalam serta pengevaluasian tujuan dengan kenyataan yang ada tanpa adanya visi tersebut kelompok tidak akan dapat menilai kinerja apakah sudah sesuai.

## 2. Fungsionalisasi dan pembagian tugas

Pembagian tugas mutlak dilakukan dalam agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan pekerjaan dan tidak menimbulkan penumpukan pekerjaan pada satu titik dan kekosongan pada titik yang lain, setiap organisasi harus diberi beban tugas sesuai latar belakang dan kemampuannya, tugas sebagai kelompok Masyarakat Peduli Bencana bukan lah hal yang mudah sehingga dalam pekerjaan kelompok diharapkan mampu bekeja sama serta melibatkan element-element atau kelompok masyarakat sekitar, menurut Bapak Sari'in *“Dalam pemberian tugas sudah cukup jelas, setiap anggota sudah*

*diberi tugasnya masing-masing namun kami masih menyadari masih sedikitnya anggota, sehingga belum mampu menanggulangi permasalahan secara keseluruhan.*

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rahman sebagai anggota Kelompok Masyarakat Peduli Bencana: *“Anggota sudah memiliki tugasnya namun jika dilihat dari beban kerja kelompok ini belum mampu melaksanakan semua tugas penanggulangan bencana secara efektif, dalam arti untuk melaksanakan tugas dalam lingkup wilayah kecamatan, kelompok ini masih minimnya anggota, dan peralatan”*

Senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Hamzah yang juga sebagai anggota kelompok: *“Sebagai anggota kelompok saya sudah diberikan tugas yang cukup jelas dalam penanganan bencana”*

Berdasarkan pernyataan di atas, kelompok masyarakat sudah memiliki pembagian tugas yang baik, namun dengan begitu besarnya volume bencana, dan minimnya anggota sehingga konsekuensi yang diterima adalah penanganan yang masih kurang efektif, dan membutuhkan waktu yang lebih banyak.

Tugas dan tanggung jawab umum MPB adalah melakukan upaya pemberdayaan kapasitas dan pengorganisasian masyarakat agar dapat

mengambil inisiatif dan melakukan tindakan yang meminimalkan dampak bencana di lingkungannya. Pembagian tugas kelompok MPB perlu dilaksanakan secara seksama dengan penuh pertimbangan hal ini berarti dalam pembagian tugas harus ada penyesuaian antara kemampuan perorangan anggota dan jenis pekerjaan yang akan ditangani, disamping itu disertai oleh prosedur dan disiplin kerja yang mudah dipahami oleh para pekerja yang bersangkutan. Besarnya tanggung jawab kelompok menuntut pembagian tugas dalam satuan kerja tidak dapat dielakan, pembagian kerja tersebut harus didasarkan fungsionalitas, dan menjamin setiap fungsionalisasi dapat dijalankan dengan baik. Banyaknya fungsi yang harus diselenggarakan, salah satu konsekuensi dari penerapan fungsionalitas ialah kejelasan dalam pembagian tugas prinsip ini penting karena tidak sedikit tugas yang spesialisitik sehingga memerlukan deskripsi dan spesifikasi tugas se jelas mungkin.

### 3. Departementalisasi

Departementalisasi ialah salah satu cara yang dapat digunakan dalam pembagian tugas, maksudnya semua tugas yang harus dilaksanakan dikelompokkan kedalam departemen, sebagaimana yang di jelaskan oleh Bapak Sari'in *“Dikarenakan kelompok*

*masyarakat mempunyai sedikitnya anggota tidak ada pembagian kelompok-kelompok kedalam sub-sub, kelompok masing-masing bekerja secara keseluruhan”*

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rahman sebagai anggota Kelompok Masyarakat Peduli Bencana: *“Kelompok Masyarakat Peduli Bencana, tidak terbagi dalam sub-sub khusus, kelompok hanya terdiri atas, ketua, wakil dan anggota saja, ini dikarenakan jumlah anggota yang masih sedikit”*

Senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Hamzah yang juga sebagai anggota kelompok: *“Tidak ada pembagian khusus dalam kelompok, apalagi pembagian dalam kedepartemen-departemnya, kami bekerja berkelompok secara keseluruhan”*

Berdasarkan pernyataan di atas, tidak ada pembagian anggota kedalam departemen, hal ini dikarenakan sedikitnya anggota dari kelompok, minimnya anggota menjadi permasalahan tersendiri dalam pelaksanaan tugas, kelompok saat ini hanya terdiri dari 10 orang, yang bergerak dalam ruang lingkup kecamatan, hal ini tentu perlu perekrutan anggota, dengan jumlah anggota yang cukup kelompok dapat membagi anggota kedalam kelompok tertentu sesuai dengan kemampuan dan tugasnya, pembagian kelompok ini dimaksudkan

terciptanya keefektifan dan keefisienan serta memusatkan kemampuan kelompok.

Departementalisasi sangat diperlukan oleh kelompok masyarakat peduli bencana sebagai penentuan cara cara dimana kelompok dapat memutuskan pola kelompok yang akan digunakan untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan yang bermacam-macam untuk dilaksanakan secara seksama, efisiensi dalam pekerjaan tergantung pada keberhasilan integrasi satuan-satuan yang bermacam-macam., pertimbangan yang penting dalam pembentukan departemen adalah dalam menentukan dasar-dasar pengelompokan ke dalam bagian-bagian yang sesuai dengan kemampuan anggota itu sendiri, sehingga kelompok dapat bekerja dengan baik dan mampu menanggulangi bencana yang terjadi.

4. Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab .

Keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab – seseorang cenderung memperbesar wewenang dan memperkecil tanggung jawab, sehingga kecenderungan tersebut perlu dipahami guna mengurangi kecenderungan tersebut, menurut bapak Sari'in: *“Sebagai anggota kelompok sudah jelas memilik tanggung jawab yang besar, namun tanggung jawab kurang dijalankan sehingga belum ada keseimbangan.”*

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Rahman sebagai anggota Kelompok Masyarakat Peduli Bencana: *“Belum ada keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab, dikarenakan besarnya tanggung jawab dan kecilnya wewenang yang diberikan”*

Senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Hamzah yang juga sebagai anggota kelompok: *“Saya merasa belum adanya keseimbangan antara wewenang dan tanggung jawab saya sebagai anggota kelompok”*

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa sebagai anggota kelompok MPB memiliki tanggungjawab yang besar, terlebih kelompok MPB merupakan sebuah organisasi yang bergerak di bidang kemanusiaan, sehingga menyita banyak waktu, tenaga dan biaya.

Tanggung jawab dari kelompok adalah menggerakkan masyarakat dalam melaksanakan program kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat serta sosialisasi konsep kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat dan kesadaran masyarakat tentang tingkat bahaya, kerentanan, dan risiko bencana dari rumah kerumah atau dari keluarga ke keluarga maupun kepada masyarakat luas dalam berbagai kesempatan.

Tanggungjawab sebagai anggota kelompok seringkali terkesampingkan oleh kepentingan pribadi dalam hal pemenuhan kebutuhan, dikarenakan tidak ada pemberian kompensasi yang diberikan sebagai anggota, wewenang dan tanggungjawab harus seimbang. Setiap pekerjaan harus dapat memberikan pertanggungjawaban yang sesuai dengan wewenang, oleh karena itu, makin besar tanggungjawab yang terima maka semakin besar pula kewenangan yang di dapat.

#### 5. Kesatuan arah dan komando

Kesatuan arah menekankan pada efisiensi, efektifitas kerja, dalam berarti tidak adanya upaya yang sia-sia dalam langkah-langkah operasional yang diambil bukan untuk kepentingan individu melainkan untuk kepentingan umum. Sedangkan Kesatuan komando, prinsip ini biasa dikaitkan dengan sumber perintah artinya pelaksanaan tugas didasarkan pada atasan, dan kepada atasan itu pula yang bersangkutan mempertanggung jawabkan tugas yang diberikan kepadanya, menurut bapak Rahman *“perintah dalam pelaksanaan kegiatan diberikan oleh bapak sari'in sebagai ketua kelompok”*

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Sari'in sebagai ketua

Kelompok Masyarakat Peduli Bencana:  
*“Pengarahan tugas anggota kelompok diarahkan saya sendiri, sesuai dengan arahan yang saya dapatkan dari kepala pelaksana BPBD KKU, yaitu Bapak Triyono”*

Senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Rahman sebagai anggota kelompok:  
*“Perintah diberikan oleh bapak sari'in sebagai anggota kelompok kami”*  
Berdasarkan pernyataan diatas pengarahan kelompok diberikan oleh ketua kelompok yaitu bapak sari'in, dan dimana ketua kelompok mendapat pengarahan dari kalak BPBD KKU. Pelaksanaan tugas-tugas dan tanggung jawabnya, anggota kelompok perlu diarahkan agar dalam pelaksanaan tugasnya berjalan dapat dengan baik, oleh karena itu, perlu alur yang jelas dari mana anggota kelompok mendapat wewenang untuk melaksanakan pekerjaan dan kepada siapa ia harus mengetahui batas wewenang dan tanggungjawabnya agar tidak terjadi kesalahan.

#### 6. Kejelasan kebijakan tentang pola pengambilan keputusan

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan organisasinya. Yang diinginkan semua kegiatan itu dapat berjalan

lancar dan tujuan dapat tercapai dengan mudah dan efisien. Namun kerap kali terjadi hambatan- hambatan dalam melaksanakan kegiatan. Ini merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh pimpinan organisasi. Pengambilan keputusan dimaksudkan untuk memecahkan masalah tersebut. Kerap kali pengambilan keputusan itu hanya merupakan satu segi saja, misalnya hanya menyangkut segi keuangan saja dan kalau dipecahkan tidak menimbulkan efek sampingan atau akibat lain. Pola pengambilan keputusan berdasarkan asas dasar desentralisasi yaitu pengambilan keputusan dilakukan oleh BPBD KKU. Menurut bapak Sari'in *“Kelompok memiliki kejelasan dalam upaya pengambilan keputusan, pengambilan keputusan dilakukan oleh ketua kelompok, dan pola pengambilan keputusan tertinggi diberikan oleh kepala pelaksana BPBD”*

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ramli AM. Ra sebagai ketua Kelompok BPBD KKU:  
*“Pengambilan keputusan dilakukan oleh saya sendiri selaku Kalak BPBD KKU, namun Ketua kelompok juga diberi wewenang dalam pengambilan keputusan, dalam, dalam keadaan darurat”*

Senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Rahman yang juga sebagai anggota

kelompok: *“Pengambilan keputusan selama ini lakukan oleh Bapak Sari’in sebagai ketua, saya dan anggota lainnya juga diberi wewenang untuk memberi masukan dalam setiap keputusannya”*

Berdasarkan pernyataan diatas keputusan dilakukan oleh ketua kelompok, dimana ketua kelompok yaitu bapak sari’in, namun pada situasi tertentu ketua kelompok diberi wewenang mengambil keputusan, ini menunjukkan asas pengambilan keputusan sudah jelas dalam kelompok masyarakat peduli bencana. Pola pengambilan keputusan dalam kelompok masyarakat peduli bencana menggunakan asas setralisasi, Sebuah keputusan merupakan pilihan yang dibuat dari alternatif-alternatif yang ada, pengambilan keputusan mengharuskan adanya usaha baik sebelum ataupun sesudah dibuatnya pilihan yang nyata, keputusan yang baik akan memberikan hasil yang baik pula bagi kelompok sehingga perlu kehati-hatian dalam pengambilan keputusan. Dalam Pengambilan keputusan diharapkan kelompok mampu mengenali masalah-masalah dan peluang-peluang yang terjadi.

#### 7. Rentang Kendali

Fungsi pengendalian dilakukan dengan kontrol dan evaluasi kerja. BPBD kabupaten Kayong utara berperan sebagai kontrol. Metode pengendalian yang

dilakukan pada kenyataannya hanya sebatas pada pelaporan dan melihat keaktifannya melalui laporan kegiatan saja. *“Seperti yang dikemukakan bapak Sari’in bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang dilakukan berupa laporan kegiatan yang berisi foto-foto kegiatan dan kegiatan itu sendiri”*.

Pernyataan di atas sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Ramli AM. Ra: *“Model pengawasan yang dilakukan melalui laporan berkala dan melibatkan mereka pada kegiatan”*

Senada dengan apa yang dikatakan oleh bapak Hamzah yang juga sebagai anggota kelompok: *“setiap kegiatan yang dilakukan saya melaporkan kegiatan itu melalui foto-foto kegiatan saja”*

Berdasarkan pernyataan yang dikemukakan, menunjukkan bahwa ketika kelompok MPB sudah menyerahkan laporan, seolah-olah sudah selesai tanggung jawab dalam pengawasan. Sementara tugas pokok dan fungsi yang utama yaitu mensosialisasikan kesiapsiagaan bencana di masyarakat belum terpantau. Kondisi ini masih jauh dari pemahaman pengawasan itu sendiri dimana fungsi pengawasan berhubungan dengan perbandingan kejadian kejadian dengan rencana, dan melakukan tindakan-tindakan koreksi yang perlu

terhadap kejadian-kejadian yang menyimpang dari rencana. Sistem pengawasan dan dilakukan secara berkala seperti bagaimana kondisi kelompok MPB dan bagaimana menggali informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh intern dalam pelaksanaan tugasnya.

Beragamnya latar belakang pekerjaan berkaitan dengan tingkat pendapatan anggota

Belum meratanya keberadaan menyebabkan akses informasi terkait bencana juga menjadi terhambat

Fungsi dasar manajemen belum terlaksana secara maksimal aspek manajemen mencakup fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan pengawasan

Belum mampunya kelompok memanfaatkan kearifan lokal deteksi dini bencana dan belum mampu memanfaatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya penanggulangan bencana.

3. Peluang  
Tuntutan akan pentingnya upaya penanggulangan bencana dari masyarakat, serta dukungan yang positif dari masyarakat. Adanya bantuan dari dinas sosial, BPDB, pemerintah kecamatan, melalui APBD. Adanya dukungan dari pemerintah daerah

4. Ancaman  
Besarnya volume dan frekuensi bencana Kondisi lingkungan yang memiliki potensi bencana. Kondisi masyarakat yang masih menunggu bantuan ketika terjadi bencana

#### 4.2 Analisis SWOT

Berdasarkan analisis lingkungan dan lingkungan *eksternal* yang berkaitan dengan objek penelitian maka dapat diidentifikasi yang berkaitan dengan faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagai berikut :

##### 1. Kekuatan

Kelompok adalah masyarakat yang menyatakan diri menjadi relawan dan bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran mereka, berdasarkan bekal pengetahuan dan keterampilan kesiapsiagaan dan tanggap bencana.

Pelibatan masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana yang merupakan anggota masyarakat di wilayahnya, ini adalah milik masyarakat, berasal dari masyarakat dan bekerja untuk masyarakat dan mereka akan menjalankan program yang bermanfaat bagi masyarakat dilingkungannya

##### 2. Kelemahan

### 4.3 Rekomendasi Strategi

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat disimpulkan beberapa permasalahan yang dihadapi kelompok sehingga menghambat pelaksanaan tugas kelompok adalah sebagai berikut:

1. Masalah kemampuan kelompok yang kurang mampu memanfaatkan setiap elemen masyarakat dalam upaya menanggulangi bencana.
2. Kurangnya sumberdaya yang ada dengan besarnya volume bencana sehingga tidak mampu untuk ditanggulangi.
3. Sumberdaya, sumberdana, prasaran yang terbatas, serta tidak dimamfaatkanya sistem peringatan dini kearifan lokal, dalam upaya penanggulangan bencana.
4. Maslalah ketumpang tindihan antara tugas dan tanggung jawab anggota kelompok, sehingga tugas sebagai relawan sering terabaikan.
5. Sistem pengawasan, pembagian tugas dan sistem perencanaan yang masih kurang dar BPBD KKU sehingga tugas kelompok kurang dijalankan.

Bedasarkan hasil temuan diatas maka dirokemdasikan strategi sebagai berikut :

1. Mengembangkan kemampuan dan kapasitas kelompok dalam upaya penanggulangan bencana dalam arti melibatkan seluruh elemen-elemen

kelompok masyarakat dari para tokoh adat, tokoh masyarakat pada satuan terkecil unit pemukiman penduduk (RT dan RW), kelompok keagamaan (Gereja, Masjid dan Surau), pemuda dan pegawai pemerintah (TNI, POLRI danPNS) untuk secara bersama-sama dan tergabung dalam satu peguyubantanguh bencana sehingga besar atau kecilnya volume bencana dapat ditanggulangi serta menumbuhkan pemahaman terhadap masyarakat, akan pentingnya kerjasama serta dukungan dari seluruh elemen untuk bersama sama berupaya menaggulagi bencana, menjaga lingkungna serta mengawasi pihak pihak yang dapat merugikan lingkungan.

2. Mengembangkan kemampuan anggota dengan pelatihan pelatihan kebencanaan secara berkelanjutan, sehingga memiliki keterampilan dalam penanggulan bencana
3. Mengatasi rendahnya anggaran dengan Mendesak pemerintah desa untuk menyusun rencana pengurangan bencana desa (RPBDes) dengan skim pembiayaan kegiatan dari anggaran desa, distribusi Dana CSR dari berbagai perusahaan melalui BPBD dan BNPB; dan bantuan pemerintah daerah melalui APBD.

4. Memaksimalkan sistem perencanaan dan pengawasan dari BPBD KKU dengan mengirimkan tenaga pendamping kedalam kelompok untuk membantu pembenahan dan pengawasan serta tenaga ini dapat sekaligus diperankan untuk menghidupkan keberadaan pokmas tangguh bencana.

4. Pembagian tugas yang cukup baik di dalam kelompok namun dengan begitu besarnya volume bencana dengan minimnya anggota sehingga penanganan kurang efektif dan efisien.

5. Tidak ada pembagian pembagian yang khusus dalam pengelolaan kelompok dikarenakan minimnya anggota dan beberapa anggota yang tidak aktif.

6. Sebagai anggota kelompok masyarakat peduli bencana sudah tentu memiliki tanggung jawab yang cukup besar, terlebih kelompok merupakan organisasi yang bergerak dibidang kemanusiaan, sehingga banyak menyita waktu, biaya, dan tenaga, terlebih tidak ada kompensasi yang diterima sehingga tugas sebagai relawan sering terabaikan.

7. Kelompok masyarakat peduli bencana, dalam pelaksanaan tugas tugas bergerak atas kesatuan arah yang jelas yaitu berupaya menanggulangi bencana yang terjadi dilingkungan masyarakat di Kec, Teluk Batang, KKU.

8. Kelompok masyarakat peduli bencana, dalam pelaksanaan tugas tugas bergerak atas komando yang jelas dari ketua kelompok

9. Pola kebijakan yang dilakukan berdasarkan asas desentralisasi, dimana kelompok diberikan kewenangan dari

## E. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil temuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Kelompok masyarakat peduli bencana sudah memiliki tujuan yang jelas dalam pembentukannya yaitu sebagai pendamping sekaligus sebagai penerak di dalam masyarakat dalam kegiatan kesiapsiagaan bencana dan tanggap darurat bencana.

2. Kelompok masyarakat peduli bencana memiliki visi yang sudah cukup jelas yang telah di rumuskan yaitu terwujudnya penanggulangan bencana secara cepat, tepat, dan efisien

3. Minimnya anggota kelompok serta beberapa anggota kelompok yang kurang aktif menyebabkan fungsionalisasi tidak berjalan dengan baik

BPBD KKU, untuk mengambil keputusan.

10. Pengawasan terhadap kelompok dilakukan hanya melalui laporan, berupa foto atas kegiatan, ini menunjukkan rentang kendali atau pengawasan terhadap kelompok yang masih kurang.

## F. SARAN

Adapun saran yang ditujukan untuk kelompok masyarakat peduli bencana adalah sebagai berikut :

1. Dengan kejelasan tujuan kelompok diharapkan dapat memberikan dasar yang jelas dalam pencapaian tujuan kelompok, dalam arti kelompok mampu memastikan tujuan dasar, serta dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa kelompok harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan agar tercapainya upaya penanggulangan bencana secara tepat, cepat efektif dan efisien
2. Dengan adanya misi yang jelas diharapkan dapat mendorong kelompok melihat jauh kedepan, meramalkan perubahan, memperkirakan efek perubahan, serta menyusun rencana kedepannya untuk menghadapi bencana,
3. Fungsionalisasi diterapkan dengan banyaknya fungsi yang harus dikerjakan anggota dengan prosedur kerja yang harus dipahami oleh anggota, sehingga perlunya pelatihan secara berkelanjutan terhadap anggota kelompok terutama pelatihan kebencanaan.
4. Pembagian tugas perlu dilaksanakan secara seksama baik itu dari kelompok maupun BPBD KKU mengingat dalam pembagian tugas harus adanya penyesuaian antara kemampuan seseorang dengan pekerjaan yang ditangani.
5. Departementalisasi sangat diperlukan untuk mengelompokkan kegiatan untuk dilaksanakan secara seksama, sehingga tercipta efisiensi dan efektifitas dalam penanggulangan bencana, pertimbangan dalam pembagian tersebut ialah menentukan dasar yang sesuai atas kemampuan anggotanya.
6. Tanggung jawab sebagai anggota kelompok seringkali terkesampingkan oleh kepentingan pribadi dalam hal pemenuhan kebutuhan, dan kurangnya pembiayaan dalam kegiatan sehingga kelompok mampu meminimalisir dampak bencana, serta sebagai evaluasi kedepan agar lebih baik.

perlunya mendesak pemerintah daerah untuk menyusun program kebencanaan dengan skim pembiayaan dari anggaran desan dan APBD KKU.

7. Arahan yang jelas terhadap kelompok diharapkan kelompok masyarakat peduli bencana mampu mencapai sasaran.
8. Komando yang jelas terhadap kelompok diharapkan mampu mengerakan kelompok secara seksama sehingga upaya penanggulangan bencana lebih efektif dan efisien
9. Merumuskan kebijakan kebijakan dalam penanggulangan bencana secara seksama dalam arti pengambilan keputusan melibatkan seluruh elemen terkait, baik dari masyarakat, kelompok maupun pemerintah daerah sehingga keputusan yang dihasilkan tepat sasaran dan mampu menangkap peluang peluang yang terjadi.
10. Perlunya pengawasan secara berkelanjutan terhadap kelompok, yaitu dengan mengirim tenaga pendamping kepada kelompok, tenaga ini sekaligus sebagai penggerak guna tugas dan tanggung jawab kelompok dapat berjalan dengan baik.

## G. REFERENSI

### Buku

Bungin, Burhan. 2007, "**Metode Penelitian Kualitatif**", Jakarta: Raja Grafindo Persada. Badan Pusat Statistika, *Kabupaten Kayong Utara Dalam Angka, Tahun 2015*.

David. R.F, 2009 "**Manajemen Strategis: Konsep**", Dalam Agus Wijaya, dan Hadi (Editor). **Concepts Of Strategis Management**. Terjemahan Alexander Sindoro hlm 182 – 191. Yogyakarta: PT Intan Sejati.

Nurjanah, dkk. 2012. "**Manajemen Bencana**" Yogyakarta. Alfabeta

Kodoatie, J.Robert dan Sugiyanto.2002. **Banjir Beberapa Penyebab dan Metode Pengendaliannya dalam Perspektif Lingkungan**.Yogyakarta : Pustaka Pelajar  
Komariah, Aan dan Satori, Djam'an. 2007. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : Alfabeta.

Moleong, L. 2011. **Metodologi Penelitian Kualitatif**. Bandung : Rosdakarya.

Nogi, hessel S, Tangkilisan.2004 **Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Birokrasi Publik**. Yogyakarta : YPAPI.

Norman K. Denzin, dan Yvonmas Lincoln. 2004. "Handbook Of Qualitative Research". dalam Dariyatno, Badrus Samsul, Abi, John Rinaldi dan Safuddin Zuhri Qudsy (Editor). **Handbook Of Qualitative Research**. Hal. 300-307.Yogyakarta: Pustaka Pranaya

Sugiyono.(2011). **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D**. Alfabeta: Bandung.

Taufik, M. Amir. 2012. **Manajemen Strategik**. Jakarta : Rajawali Press.

Umar Husein. 2013. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Republik indonesia. 2007. *Undang – Undang no 24, Tahun 2007*, Tentang Penanggulangan Bencana Alam. Sekretariat Negara. Jakarta.

### Jurnal/skripsi

Ahmad Pratama, Putra. 2011. Jurnal Penanggulangan Bencana. (Jurnal)*Penataan Ruang Berbasis Mitigasi Bencana Kepulauan Mentawai*. BNPB.2014. *Jurnal Index Resiko Bencana Indonesia*.

Republik indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008* tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Republik indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000* Tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas)

Zamroni, Imam. 2011. “ Jurnal Penanggulangan Bencana”. (Jurnal) *Kearifan lokal dalam penanggulangan bencana di jawa*.

Jufriyadi, Ahmad 2012. “*Sosialisasi Pengurangan Resiko Bencana Di Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang Sebagai Upaya Pendidikan Mitigasi Bencana*”.

### Dokumen

Abidin, Erdi. 2014. *Memaknai bencana dengan bijak*. Harian Pontianak Post, 6 Agustus 2014

Abidin, Erdi. 2014. *Mempersiapkan Pokmas Tangguh Bencana Di Kalbar*. Harian Pontianak Post, 30 Desember 2014

Kemendiknas.2010. *Gugus Tugas Pengarusutamaan Pengurangan Risiko Bencana dalam Sistem Pendidikan Nasional..* Strategi PengarusutamaanPengurangan Risiko Bencana Di Sekolah. Jakarta

Maarif, Syamsul. 2012. PERKA BNPB No. 02 Tahun 2012 Tentang PedomanUmum Pengkajian Risiko Bencana. Jakarta.



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
 UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
 FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
 PENGELOLA JURNAL MAHASISWA  
 Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124  
 Homepage: <http://jurmafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH / PUBLIKASI  
 KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : Muhammad Sahid  
 NIM / Periode lulus : E0111073 / 2016 / 2017  
 Tanggal Lulus : 19 Desember 2016  
 Fakultas/ Jurusan : IPS / ILMU ADMINISTRASI NEGARA  
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI  
 E-mail address/ HP : Conansahid@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika (\*) pada Program Studi ILMU ADMINISTRASI Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul (\*\*):

Strategi penguatan Masyarakat  
Siaga bencana di Kabupaten Kayong Utara

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltext*
- content* artikel sesuai dengan standar penulis jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.



Dibuat di : Pontianak  
 Pada tanggal : 11/1/2017

[Signature]  
 NIM. E0111073

Catatan :  
 \*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing  
 (*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologique*)

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)